



Realisasi Semester I APBN 2026: Penerimaan Pajak Tumbuh Signifikan, APBN Tetap Solid Di Tengah Ketidakpastian Global

Jakarta, 20 Juli 2026 - Pada semester pertama tahun 2026, perekonomian global masih dihadapkan pada tingkat ketidakpastian yang tinggi seiring berlanjutnya berbagai konflik geopolitik di sejumlah kawasan dunia. Salah satu perkembangan yang menjadi perhatian utama adalah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran yang turut melibatkan Amerika Serikat, sehingga meluas dan memengaruhi stabilitas kawasan Timur Tengah. Kondisi tersebut meningkatkan risiko gangguan terhadap kelancaran perdagangan internasional serta distribusi energi global, khususnya melalui Selat Hormuz yang menjadi jalur strategis bagi sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Gangguan pada jalur meningkatkan potensi kenaikan harga komoditas dan energi, meningkatkan tekanan inflasi global, memicu volatilitas pasar keuangan, memperbesar risiko arus modal keluar, serta memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Di tengah dinamika tersebut, sejumlah lembaga internasional merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2026. World Bank menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,5 persen (Januari 2026) dari sebelumnya 2,6 persen. International Monetary Fund (IMF) turut merevisi proyeksi pertumbuhan global menjadi 3,1 persen (April 2026) dari sebelumnya 3,3 persen, sementara *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menurunkan proyeksinya menjadi 2,8 persen (Maret 2026) dari sebelumnya 2,9 persen. Revisi tersebut mencerminkan meningkatnya kewaspadaan berbagai lembaga internasional terhadap risiko yang berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi dunia.

"Di mana belanja pusat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di semester I-2026 tersebut," ungkap Menteri Keuangan. Di tengah berbagai tantangan global tersebut, fundamental perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang kuat dan solid. Pada triwulan I tahun 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen (*year-on-year/yoy*), berada di atas rata-rata pertumbuhan sejumlah negara mitra utama seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang. Stabilitas ekonomi domestik juga tetap terjaga, tercermin dari inflasi yang terkendali pada level 3,34 persen (*yoy*) pada Juni 2026. Posisi cadangan devisa tercatat sebesar USD144,9 miliar, setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor, sementara aliran masuk modal asing secara kumulatif hingga akhir Juni 2026 tercatat sebesar Rp104,2 triliun, mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap stabilitas sektor keuangan domestik dan prospek perekonomian nasional.

Di pasar keuangan, nilai tukar rupiah rata-rata sepanjang semester I tahun 2026 tercatat sebesar Rp17.197/US\$, melemah dibandingkan rata-rata tahun 2025 sebesar Rp16.475/US\$ seiring tingginya ketidakpastian global dan tekanan terhadap mata uang negara berkembang. Meskipun demikian, yield

Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun tercatat sebesar 6,57 persen (*year-to-date/ytd*) per akhir Juni 2026, masih lebih rendah dari asumsi APBN 2026 sebesar 6,9 persen, mencerminkan terjaganya kepercayaan investor terhadap kredibilitas kebijakan fiskal dan prospek perekonomian Indonesia.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, APBN terus dioptimalkan sebagai instrumen utama kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas perekonomian, melindungi kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional. APBN berperan sebagai peredam guncangan (*shock absorber*) yang mampu meredam dampak gejolak global terhadap perekonomian domestik sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pemerintah terus melaksanakan berbagai program prioritas secara konsisten, antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, perluasan perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan desa dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kinerja APBN hingga semester I tahun 2026 menunjukkan hasil yang positif dan tetap menjalankan fungsinya sebagai instrumen kebijakan fiskal yang bersifat *countercyclical*. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.459.442,5 miliar atau 46,3 persen dari target APBN tahun 2026, tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp1.187.769,3 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp270.980,2 miliar.

Penerimaan perpajakan mencatatkan tren akselerasi sepanjang semester I tahun 2026, tumbuh 14,3 persen (yoy) pada triwulan I dan meningkat menjadi 21,4 persen (yoy) pada triwulan II, dengan penerimaan PPN dan PPnBM tumbuh signifikan sebesar 42,2 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut didukung oleh aktivitas ekonomi domestik yang tetap terjaga, penguatan tata kelola pajak serta kepabeanaan dan cukai, efektivitas implementasi Coretax, peningkatan harga komoditas utama, produksi hasil tembakau, dan nilai impor. Sementara itu, kinerja PNBP didorong oleh kenaikan harga komoditas, peningkatan volume layanan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Badan Layanan Umum (BLU), serta penguatan tata kelola termasuk penegakan hukum di sektor PNBP. Perkembangan tersebut mencerminkan terjaganya kapasitas fiskal dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan kesinambungan APBN.

Sampai dengan semester I tahun 2026, realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.655.956,6 miliar atau 43,1 persen dari pagu APBN tahun 2026, tumbuh 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1.298.577,0 miliar (41,2 persen dari pagu, tumbuh 29,4 persen yoy) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp357.379,6 miliar (51,6 persen dari pagu). Realisasi BPP terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp658.861,2 miliar dan belanja non-K/L sebesar Rp639.715,8 miliar.

Realisasi belanja tersebut antara lain digunakan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial seperti PBI JKN, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan

(PKH), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi ASN/TNI/Polri, pembangunan infrastruktur konektivitas dan ketahanan pangan, serta pembayaran kewajiban kompensasi energi tahun 2025. Adapun realisasi TKD dipengaruhi oleh peningkatan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), percepatan pemenuhan persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK), serta kinerja pemerintah daerah dalam penyerapan anggaran.

Sejalan dengan kinerja Pendapatan Negara dan Belanja Negara tersebut, postur APBN sampai dengan semester I tahun 2026 mengalami defisit sebesar Rp196.514,1 miliar atau 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan keseimbangan primer mencatatkan surplus sebesar Rp85.099,7 miliar. Kondisi ini mencerminkan efektivitas pengelolaan fiskal yang mampu menjaga keberlanjutan APBN sekaligus mendukung stabilitas perekonomian nasional. “Kondisi tersebut mencerminkan bahwa defisit APBN tetap dijaga dalam batas aman dan terkendali,” jelas Menteri Keuangan dalam paparan yang disampaikan kepada Banggar DPR.

Memasuki semester II tahun 2026, Pemerintah tetap mewaspadaai berbagai risiko global yang berpotensi memengaruhi kinerja perekonomian nasional, antara lain eskalasi ketegangan geopolitik, fluktuasi harga komoditas, gangguan rantai pasok, serta dinamika pasar keuangan global yang masih diwarnai ketidakpastian tinggi. Meskipun demikian, fundamental perekonomian Indonesia diperkirakan tetap berada dalam kondisi yang kuat dan solid. Pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 5,4-6,0 persen, didukung oleh terjaganya konsumsi rumah tangga, meningkatnya investasi, dan dorongan belanja negara melalui pelaksanaan berbagai program prioritas Pemerintah. Tingkat inflasi diperkirakan tetap terkendali sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional secara sehat dan berkesinambungan.

Sejalan dengan prospek ekonomi tersebut, pendapatan negara tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp3.208.056,0 miliar atau tumbuh 16,0 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, didukung oleh prospek perekonomian nasional yang tetap solid, implementasi berbagai langkah optimalisasi penerimaan (*extra effort*), serta peningkatan kualitas layanan Kementerian/Lembaga. Optimalisasi penerimaan perpajakan ditempuh melalui penguatan reformasi administrasi perpajakan, perluasan basis pajak melalui implementasi Coretax yang semakin efektif, ekstensifikasi barang kena cukai, serta penindakan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sementara itu, optimalisasi PNBP dilakukan melalui peningkatan kinerja pengelolaan sumber daya alam, penguatan kualitas layanan K/L termasuk penegakan hukum di sektor PNBP, serta peningkatan efisiensi dan produktivitas pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).

Outlook Belanja Negara tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp3.942.376,0 miliar atau tumbuh 14,8 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, diarahkan untuk menjaga momentum

pertumbuhan ekonomi melalui penyelesaian berbagai program prioritas, antara lain dukungan di bidang pendidikan (program sekolah rakyat, revitalisasi sekolah, sekolah unggul Garuda, dan MBG), penguatan ketahanan pangan, serta penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di samping percepatan penyerapan belanja pemerintah pusat serta penyaluran subsidi dan kompensasi energi guna menjaga daya beli masyarakat. Dengan memperhatikan strategi fiskal serta *outlook* Pendapatan Negara dan Belanja Negara tersebut, defisit APBN tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp734.320,0 miliar atau setara dengan 2,85 persen terhadap PDB. Besaran defisit tersebut dirancang tetap berada dalam batas yang terkendali, sejalan dengan upaya menjaga kesinambungan fiskal serta mendukung pembiayaan agenda pembangunan nasional melalui penerapan strategi fiskal yang prudent, adaptif, dan fleksibel.

Narahubung Media:

Robi Toni
Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan



081310004134

kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id



Ditjen Anggaran



ditjenanggaran



@ditjenanggaran



Ditjen Anggaran